

## RELASI KUASA TEOLOGI MURJI'AH DAN BANI Umayyah

### Abstrak:

*Dalam Islam hubungan agama dan politik sangat erat. Problem pertama yang muncul setelah meninggalnya Rasulullah adalah tentang suksesi kepemimpinan. Meskipun suksesi kepemimpinan itu pada mulanya menjadi perdebatan sengit di kalangan sahabat, tetapi pada tahap selanjutnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama pascakenabian. Begitu pula pengangkatan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan sebagai khalifah relatif lancar. Perdebatan sengit dan konflik terbuka terjadi ketika Ali bin Abu Thalib diangkat menjadi khalifah.*

*Pada masa kekhalfan Ali dan sesudahnya umat Islam terbelah menjadi beberapa kelompok (firqah) yang memiliki aliran politik yang berbeda-beda. Maka perdebatan yang terjadi pun bukan hanya tentang suksesi kepemimpinan tetapi juga tentang siapa orang mu'min yang berhak menjadi warga negara dari sistem pemerintahan Islam (ummah). Maka tiap kelompok dalam umat Islam, seperti Khawarij, Syi'ah dan Murji'ah, berusaha untuk mendefenisikan iman yang sesuai dengan afiliasi kelompoknya.*

*Perdebatan tentang defenisi mu'min merupakan hal yang tidak terelakan dalam sejarah Islam, hal ini didasarkan pada sistem perpolitikan Islam yang didasarkan pada doktrin agama. Maka ideologisasi Islam untuk meraih kekuasaan menjadi tidak terelakkan. Islam menjadi alat yang paling laku untuk melegitimasi kekuasaan.*

*Hal ini pula yang dilakukan oleh Bani Umayyah untuk melanggengkan kekuasaannya. Ia berusaha untuk mencari justifikasi dari agama bahwa kekuasaannya sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran teologi Islam yang memberi legitimitasi tentang kekuasaan Bani Umayyah adalah Murji'ah. Ajaran teologi ini tidak berkembang ketika penyokongnya, Bani Umayyah mengalami keruntuhan.*

**Kata Kunci:** *relasi kuasa, mu'min, Bani Umayyah, ummah.*

## Pendahuluan

Dalam Islam hubungan antara agama, sebagai sumber keyakinan dan perintah moral, dengan politik yakni strategi atau sistem kekuasaan dalam suatu negara, memiliki kaitan yang sangat erat<sup>1</sup>. Hal itu memang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah yang dilalui umat Islam sendiri. Semenjak awal kehadirannya dalam panggung sejarah, pergumulan antara perintah moral yang berasal dari ajaran-ajaran Islam dan realitas sosio-politik telah berlangsung, meskipun belum terlalu kompleks. Nabi Muhammad Saw dan para sahabat adalah orang-orang yang memiliki integritas moral yang tinggi. Dengan demikian sampai batas-batas tertentu, politik tetap berfungsi sebagai kendaraan moral religius yang efektif. Sehingga tidak mengherankan kalau banyak pemikir muslim yang mengidealisasikan periode dini ini.

Pasca kenabian Muhammad Saw., persoalan politik yang mencuat adalah suksesi kepemimpinan umat Islam (*khalifah*). Adalah wajar dan dapat dimengerti pertanyaan penting pertama yang dihadapi oleh kaum muslimin pada masa-masa awal setelah Nabi wafat adalah: menjadi milik siapakah seharusnya kepemimpinan umat Islam? Pendek kata, siapa yang akan menjadi khalifah? Khalifah artinya seorang yang akan datang kemudian, pengganti atau wakil.

Meskipun sempat terjadi perdebatan sengit dan sedikit kericuhan di antara para sahabat Nabi, tetapi umat Islam pada umumnya menerima terpilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin umat, yang kemudian digantikan oleh Umar bin Khatab. Setelah meninggalnya Umar bin Khatab, kepemimpinan umat Islam jatuh ke tangan Utsman bin Affan. Pada periode kepemimpinan Utsman bin Affan ini, umat Islam mengalami perpecahan dan konflik sosial yang kemudian menjurus kepada konflik politik yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan sendiri.

Kematian Utsman tersebut yang kemudian menyebabkan konflik sosial dan politik yang hebat di kalangan umat Islam, yang menentukan perjalanan sejarah umat Islam generasi berikutnya. Ini membuka periode pertama perang saudara dalam komunitas muslim. Calon penggantinya, Ali bin Abi Thalib ternyata tidak mendapat dukungan penuh dari sahabat dan masyarakat muslim secara keseluruhan. Keluarga Utsman bin Affan yang merasa tidak puas atas kematiannya dan menuntut untuk menghukum para pembunuh, menyatakan ketidaksetujuannya dan mengadakan perlawanan terhadap kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib.

Muawiyah bin Abi Sufyan, salah seorang keluarga dekat Utsman, yang menjadi gubernur di Syiria, mengadakan perlawanan dan tidak

mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib di Madinah. Kedua kekuatan tersebut kemudian terlibat dalam peperangan di Shiffin di dataran tinggi Eufkrat, yang kemudian mereka sepakat mengadakan arbitrase (*tabkim*) melalui para delegasi yang dipilih dari kedua belah pihak. Ketika Ali menyetujui hal itu, sebagian pendukungnya menolaknya karena mereka tidak mau menerima kompromi dan menginginkan perkara ini diserahkan kepada kehendak Tuhan, menurut pandangan mereka, daripada kepada pengadilan manusia. Kelompok pendukung Ali yang tidak setuju pada sikap ini pada masa kemudian membuat kelompok baru yang dikenal dengan nama Khawarij. Sedangkan kelompok yang tetap setia kepada Ali menamakan dirinya Syi'ah. Pada bulan-bulan selanjutnya yang diisi dengan konflik dan negoisasi antara kedua belah pihak, kelompok Ali semakin melemah karena adanya perpecahan internal yang tajam. Pada akhirnya Ali pun terbunuh di kota Kufah. Muawiyah memproklamasikan dirinya sebagai khalifah.<sup>2</sup>

Konflik politik tersebut tidak berhenti hanya di wilayah politik semata, tetapi masing-masing kelompok berusaha untuk mencari legitimasi dari agama untuk memperkokoh kelompoknya. Seiring dengan perkembangan waktu, mereka berusaha untuk mensistematiskan pemikiran keagamaan yang diambil dari doktrin agama terutama al-Qur'an dan al-Hadist yang disesuaikan dengan kelompoknya. Kelompok Khawarij menyatakan bahwa sikapnya menolak kompromi dengan Muawiyah dan keluar dari barisan Ali itu sesuai dengan perintah Allah yakni Al-Nisa: 100 yang berbunyi; "keluar dari rumah lari kepada Allah dan Rasul-Nya".<sup>3</sup> Demikian pula yang dilakukan kelompok pendukung Ali atau kaum Syiah dan para pendukung Muawiyah. Pada akhirnya setiap kelompok gerakan politik memiliki sistem teologi tersendiri yang khas yang dijadikan sebagai ideologi perjuangan untuk mempertahankan kelompoknya. Dengan demikian tidak aneh apabila dijumpai adanya keterkaitan yang erat antara teologi dan politik.

Politik memang sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia, betapa *phobia* pun sebagian manusia untuk membicarakannya. Melakukan suatu tindakan tertentu atau memilih memakai bahasa atau kata-kata tertentu tak lain dari berpolitik dalam makna yang paling dalam dan luas. Salah satu sarana politik untuk mengendalikan masyarakat adalah melalui ideologi. Ideologi adalah serangkaian prefensi yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas politik. Ia dibentuk melalui suatu proses sosial tertentu yang kemudian dirumuskan secara jelas dan sistematis oleh elit intelektual dan kemudian disebarkan kepada anggota komunitas politik lainnya.<sup>4</sup>

Dalam masyarakat yang religius, ideologi yang efektif untuk mengarahkan dan mengendalikan masyarakat adalah melalui bahasa agama. Maka, dalam kasus Islam, hal itu sangat nampak dengan jelas. Masing-masing kelompok gerakan politik, baik Khawarij, Syiah, Muawiyah dan yang lainnya, berusaha untuk mencari prefensi yang efektif untuk menarik simpati dan mengendalikan masyarakat ke arah yang diinginkannya.<sup>5</sup> Sarana prefensi yang efektif dalam masyarakat muslim adalah ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw., maka tidak dapat dielakan penggunaan ayat-ayat suci sebagai ideologi dalam praktek politik pada setiap kelompok dalam Islam. Pada langkah selanjutnya, agar ideologi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual, para elit intelektual dari masing-masing kelompok mensistematiskan dan menyebarkan kepada para anggota kelompoknya. Karena ideologi politik tersebut diambil dari ajaran agama yang memiliki dimensi kesakralan dan transendental, maka tertanam dalam benak para anggota masing-masing kelompok rasa kesucian dan kepatuhan yang tinggi dalam memahami doktrin-doktrin politik yang disampaikannya.

Tulisan ini akan berusaha untuk mengelaborasi hubungan antara sistem teologi dan sikap politik yang dimiliki oleh Muawiyah. Muawiyah yang berhasil memenangkan perseteruan dan peperangan dalam menghadapi Ali dan pendukungnya berusaha untuk mencari landasan teologis yang dijadikan ideologi untuk melegitimasi tindakan-tindakan politiknya. Maka tidak dapat dielakan dalam tulisan ini pun akan dibahas pula doktrin-doktrin yang disampaikan oleh Khawarij dan Syi'ah yang merupakan lawan politik dan ancaman serius terhadap dinasti Bani Umayyah.

## **Wacana tentang Identitas Mu'min**

Berbeda dengan politik modern yang berdasarkan pada konsep *nation state* (negara kebangsaan) yang menjadi dasar pokok identitas politiknya, konsep politik muslim masa awal dan pra modern adalah mengacu kepada kelompok sosio-relegius yang dikenal dengan *ummah*. Konsep *nation state* berdasarkan kepada kriteria-kriteria etnisitas, kultur dan bahasa, dan wilayah. Maka yang menjadi sasaran loyalitas warga negara adalah nasionalisme dengan kedaulatan ada di tangan rakyat. Konsekwensinya, kebijakan politik yang tercakup dalam *nation state* mengabaikan batasan-batasan agama.

Sedangkan konsep teori dan kultur politik Islam masa awal dan pra modern berdasarkan kepada ke-*iman-an*, bukan pada kriteria-kriteria etnisitas, kultur dan bahasa atau kedudukan geografis. Pada tingkat

institusional, “kekhalifahan” merupakan institusi politik yang menegaskan bahwa semua wilayah *dar al-Islam* pada dasarnya merupakan suatu negara. Maka klaim kedaulatan didasarkan kepada “kedaulatan Tuhan” yang manifestasinya tercermin dalam syari’ah.<sup>6</sup>

Karena konsep perpolitikan Islam dalam masa awal dan pra-modern didasarkan atas keimanan, maka perdebatan yang muncul setelah *khilafah* adalah tentang *iman*, terutama siapa yang dimaksud orang mu’min atau orang beriman? Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat penting bagi suatu identifikasi anggota komunitas *ummah* yang mulai berkembang. Menjadi muslim berarti menjadi anggota komunitas muslim (*ummah*) dan diperbolehkan menikmati semua hak-hak yang sebagai sesama muslim, baik spiritual maupun material. Mereka harus diperlakukan sebagai anggota yang sah dari anggota masyarakat muslim. Karena itu tidak dapat diganggu baik dirinya maupun hartanya. Sebaliknya, apabila ia seorang kafir, maka ia tidak mendapatkan hak-hak sebagai mana yang diperoleh orang mu’min, termasuk perlindungan terhadap diri dan hartanya. Karena seorang kafir boleh dibunuh apabila ia tidak menunjukkan kesetiannya terhadap pemerintahan Islam.

Dalam struktur pemerintahan masyarakat muslim, manusia dibagi menjadi dua kelompok besar yakni *mu’min* (orang percaya) dan *kafir* (tidak percaya). Semua *mu’min* adalah anggota-anggota masyarakat muslim yang telah menyatakan dirinya setia mengikuti ajaran Muhammad Saw dan untuk percaya kepada Allah. Mereka memiliki sejumlah hak-hak yang harus dilindungi oleh negara. Sedangkan *kafir* adalah orang luar dari komunitas muslim yang tidak bisa memasuki lingkungan muslim kecuali ia seorang yang telah menyatakan dirinya ‘menyerah’ (makna asli dari *islam*) atau menjadi anggota baru komunitas muslim.

Namun prosedur formal proses “penyerahan” atau proses dari *kafir* menjadi *mu’min* yang otomatis menjadi komunitas muslim itu tidak ketat, yakni dengan hanya mengucapkan kalimat *syahadah* (*la ilaha illa Allah*) maka banyak orang yang kepercayaannya meragukan dapat dengan mudah masuk ke dalam lingkaran anggota masyarakat muslim dan mereka secara otomatis menerima hak-hak yang sama dengan masyarakat muslim lain yang sudah lebih dahulu menjadi anggota.

Konsep *iman* (percaya) dan *kufr* (tidak percaya) atau dalam bentuk personalnya *mu’min* (orang yang percaya) dan *kafir* (tidak percaya) pada masa Nabi Muhammad Saw, dan Khalifah al-Rosyidin (terutama Abu Bakar dan Umar bin Bakar) adalah sederhana, tetapi pada masa kemudian hal itu menjadi rumit. Hal ini memang terkait dengan situasi politik yang berkembang dalam intern umat Islam sendiri. Kelompok

mu'min bukan lagi didefenisikan sebagai orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad tetapi bertendensi politik. Demikian pula, konsep kafir tidak lagi hanya dimaknai bagi orang yang menolak ajaran Muhammad Saw, tetapi orang mu'min yang tidak memenuhi kriteria tertentu bisa dianggap kafir. Kriteria tersebut biasanya disesuaikan dengan afiliasi kelompoknya.

Hal tersebut yang akhirnya menjadi perdebatan tentang siapakah orang mu'min sejati dan mu'min yang palsu? Apakah seorang mu'min yang melakukan dosa besar masih dianggap orang mu'min ataukah ia sudah menjadi kafir? Masing-masing kelompok dalam tubuh umat Islam sendiri mengklaim kelompoknya yang merupakan mu'min sebenarnya, sedangkan di luar kelompoknya merupakan mu'min palsu, atau setidaknya mu'min yang meragukan.

Khawarij memandang bahwa kelompoknya yang merupakan mu'min sejati, yakni anggota sah dari komunitas muslim sebenarnya. Mereka memandang bahwa Ali, Muawiyah, Amr bin 'Ash, Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya yang menerima arbitrase (*tabkim*) adalah kafir karena telah berbuat salah dan berbuat dosa, yakni dengan memutuskan suatu perkara bukan atas hukum Allah, padahal al-Qur'an menyatakan:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المائدة: ٤٥)

Artinya: Barang siapa yang tidak menentukan hukum dengan yang telah diturunkan Allah adalah kafir (al-Maidah: 45).

Dari ayat inilah mereka mengambil semboyan *la hukma illa lillah*. Karena itu keempat pemuka Islam di atas telah dipandang kafir dalam arti bahwa mereka telah keluar dari Islam, yaitu murtad, mereka mesti dibunuh. Maka kaum Khawarij mengambil keputusan untuk membunuh mereka berempat, tetapi menurut catatan sejarah hanya orang yang dibebani membunuh Ali bin Abi Thalib yang berhasil melaksanakan tugasnya.<sup>7</sup>

Bagi kelompok Khawarij identitas seorang mu'min atau muslim tidak hanya sebatas pengakuan atau ucapan tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Karena itu seorang yang mengaku mu'min, yakni mengakui bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad Saw adalah Rasul-Nya, tetapi ia berbuat dosa dengan melanggar perintah atau larangan Allah dan Rasul-Nya, maka status mu'minnya terlepas, dengan demikian ia menjadi kafir. Salah satu kelompok Khawarij, Taftazani menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan dosa, baik kecil maupun

besar adalah seorang kafir.<sup>8</sup> Mereka beralasan atas sebuah ayat dalam al-Qur'an

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  
(المائدة: ٥)

Artinya: "Barang siapa yang ingkar sesudah percaya, maka sia-sialah seluruh amal perbuatannya dan di akhirat termasuk orang-orang merugi" (Qs. Al-Maidah: 5)

Pendapat Khawarij yang sangat ekstrim tersebut sebenarnya tidak hanya bersifat teologis atau moral tetapi juga bersifat politik. Mereka memang bermaksud untuk mendelegitimasi kekuasaan terhadap pihak-pihak yang selama ini menjadi musuhnya terutama kalangan Bani Umayyah. Muawiyah dan keturunannya meskipun mengaku beriman tetapi mereka adalah orang-orang yang berdosa karena telah melanggar perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, seperti tidak menerapkan hukum Allah dalam pemerintahan, berlaku tidak adil dan sebagainya. Demikian pula mereka berusaha mendeligitimasi Ali yang tetap dijadikan pemimpin oleh kaum Syi'ah telah terjadinya abitrasi (*tabkim*), yang ditolak oleh kalangan Khawarij.

Demikian pula yang dilakukan oleh kelompok Syi'ah. Mereka memandang bahwa orang-orang yang telah melakukan pemberontakan atau merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah kafir, yakni Muawiyah dan para pengikutnya serta kaum Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali ketika melakukan arbitrase. Dalam pandangan mereka bahwa Ali bin Abi Thalib, sebagai seorang keluarga dekat Nabi Muhammad Saw, dan keturunannya (*ahlul bait*) adalah yang diberi "hak istimewa Tuhan" untuk mengurus kaum muslimin dalam masalah politik maupun agama. Karena itu iman yang sejati apabila mengikuti ajaran yang disampaikan oleh garis keturunan Ali bin Abi Thalib.<sup>9</sup> Atas dasar tersebut, kelompok Syi'ah tidak pernah mengakui Dinasti Bani Umayyah, karenanya selalu melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang dianggapnya bukan dari kalangan *ahlul bait*, meskipun tidak pernah berhasil.<sup>10</sup>

Kaum Syi'ah dan Khawarij, sungguh pun merupakan kelompok yang bermusuhan dan saling mengkafirkan, sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah tetapi dengan motif yang berbeda. Khawarij menentang Dinasti Bani Umayyah, karena memandang mereka

menyeleweng dari ajaran Islam, sedangkan Syi'ah menentang, karena memandang mereka merampas kekuasaan dari Ali dan keturunannya.

### Perkembangan Awal Murji'ah

Dalam suasana pertentangan seperti itu, maka muncul suatu golongan baru yang ingin bersikap netral dan tidak mau turut campur dalam praktek kafir-mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan itu. Bagi mereka sahabat-sahabat Nabi Saw. yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu mereka tidak berani melakukan penilaian tentang siapa yang sebenarnya salah dan siapa yang benar, dan mereka memandang lebih baik untuk menunda (*arja'a*) persoalan-persoalan yang diperdebatkan tersebut ke hari perhitungan di depan Allah. Kelompok ini kemudian di kenal sebagai kaum Murji'ah.<sup>11</sup>

Kaum Murji'ah sebenarnya ingin bersikap netral dan moderat dalam menghadapi pertikaian yang melanda umat Islam. Karena itu ketika dihadapkan kepada persoalan apa itu *iman* atau siapa itu orang yang beriman (*mu'min*)? Jawaban yang diberikan kelompok ini bersikap inklusif, yakni ingin mencakup semua orang yang mengaku percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Kalau kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir bagi orang mu'min yang berbuat dosa besar, kaum Murji'ah memandang mereka itu tetap mu'min. Adapun persoalan dosa besar yang mereka buat, itu ditunda penyelesaiannya ke hari perhitungan kelak. Argumentasi yang mereka ajukan dalam hal ini ialah bahwa orang mu'min yang berdosa besar itu tetap mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya. Dengan kata lain orang serupa itu tetap mengucapkan kedua syahadat yang menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu orang berdosa besar menurut pendapat golongan ini, tetap mu'min dan bukan kafir.<sup>12</sup> Karena itu dalam menjawab persoalan tentang iman dan mu'min Murji'ah berbeda dengan kaum Khawarij yang lebih menekankan pemikiran pada masalah siapa dari orang Islam yang sudah menjadi kafir, yaitu siap yang telah keluar dari Islam (*murtad*). Sedangkan Murji'ah menekankan pemikiran pada hal yang sebaliknya, siapa yang masih mu'min dan tidak keluar dari Islam.

Dengan demikian kaum Murji'ah pada awal kemunculannya adalah orang-orang netral secara politis dan moderat dalam keagamaan. Mereka itu adalah mayoritas sahabat dan masyarakat Madinah pada umumnya. Mereka adalah orang-orang yang saleh dan religius yang menghindari pertikaian politik yang selama ini terjadi di kalangan kaum

muslimin. Meskipun mereka merasakan *shock* atas perubahan besar yang dialami oleh masyarakat muslim di tangan Bani Umayyah yang kurang menunjukkan kesalehan dalam beragama. Karena itu meskipun kelompok ini pada umumnya merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Muawiyah, namun tetap menahan diri untuk tidak melakukan secara aktif suatu pemberontakan. Mereka lebih memusatkan perhatian pada kajian dan pengembangan ilmu-ilmu agama seperti Hadits dan hukum.<sup>13</sup>

Menurut kaum Murji'ah bahwa iman adalah pengetahuan dan pengakuan kepada Allah, Rasul-Nya dan semua yang datang dari Allah. Pernyataan bahwa iman adalah pengetahuan dan pengakuan merupakan manifestasi dari dasar keyakinan Murji'ah yang merasa tidak puas dengan pandangan bahwa iman adalah sesuatu yang bersifat lahiriah. Murji'ah ingin menegaskan bahwa iman adalah sesuatu yang terletak dalam hati manusia, suatu peristiwa rohaniah yang terjadi sangat dalam di dalam jiwa. Karena itu dalam pandangan Murji'ah, perbuatan merupakan sesuatu yang sekunder dalam hal keimanan.

Pandangan Murji'ah yang demikian itu memang tidak hanya pada bersifat etis, moral atau teologis semata, tetapi juga berangkat dari realitas sosial politik yang berkembang saat itu. Murji'ah nampaknya ingin mengimbangi pendapat Khawarij yang sangat ekstrim dalam mendefinisikan *iman* dan *mu'min*, sehingga banyak kalangan sahabat yang dipandang kafir akibat ada perbuatan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Dengan pendapatnya bahwa *iman* adalah pengetahuan dan pengakuan tanpa perbuatan, Murji'ah ingin menegaskan bahwa para sahabat, seperti Ali dan Muawiyah serta sahabat yang lainnya, tidak kehilangan keimanannya meskipun mereka itu dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Penilaian tentang mereka hendaknya ditangguhkan atau ditunda keputusan sampai di akhirat sehingga Allah sendiri yang akan menentukan statusnya.

Sikap Murji'ah tersebut di mata kelompok lain yang tidak setuju adalah sikap oportunistis politis dan agama. Sehingga Murji'ah sering menjadi sasaran kecaman. Sebab Murji'ah tidak mau mengecam atau mengambil tindakan konkret terhadap pemerintahan Bani Umayyah yang terkenal tidak religius (Islami) dalam cara hidupnya. Dengan sikap yang demikian, mereka seolah membiarkan penguasa yang tidak adil dan sering berbuat sewenang-wenang.

Nawbakhti, salah seorang teolog Imamiyah Syi'ah, menyatakan dalam kasus Murji'ah bahwa lawan-lawan mereka menggambarkan mereka sebagai 'orang-orang yang menyatakan diri bersikap merendahkan diri terhadap penguasa pada masa itu terlepas dari apakah

penguasa itu adil atau tidak, tunduk pada pemerintah, bersahabat dengan semua jenis orang tanpa kecuali dan menyatakan bahwa Masyarakat *Qiblah* (muslim) adalah orang-orang yang percaya karena pengakuan kepercayaan mereka secara verbal dan lahiriah, dan berdoa agar mereka memperoleh ampunan Ilahi.<sup>14</sup>

Menghadapi kecaman terhadap pihak-pihak yang tidak setuju tersebut, Murji'ah memberi alasan bahwa sikapnya yang demikian merupakan manifestasi dari rasa religiusitasnya. Mereka menunjukkan akibat yang sangat merugikan karena tindakan yang gegabah dan ekstrem dalam hal *tafkir* (menuduh orang kafir) yang dilakukan kelompok Khawarij. Merupakan suatu kelancangan bagi seseorang yang menjatuhkan keputusan kafir dengan sewenang-wenang terhadap saudara-saudaranya sendiri. Bagaimana mungkin seorang dapat menyangkal keikhlasan seorang muslim yang dengan terang-terangan menyatakan keimanannya? Keputusan akhir hanya ada pada Tuhan. Dengan demikian bahwa seseorang yang berbuat kejahatan, apabila ia telah menyatakan masuk Islam, maka ia dianggap sebagai anggota masyarakat muslim.

Berbeda dengan anggota Khawarij yang kebanyakan dari penduduk yang tidak terpelajar, anggota Murji'ah adalah orang-orang terpelajar. Karena itu masalah yang dihadapinya dan tekanan-tekanan publik yang diterimanya, maka mereka segera menyusun teori secara sistematis mengenai pengertian *iman* atau percaya dalam rangka untuk mendukung sikap "penundaan keputusan" dengan landasan yang kuat. Kemudian mereka seakan-akan tertarik untuk menetapkan suatu teori secara sistematis tentang "iman" itu sendiri. Dalam tahapan ini mereka telah menandai permulaan pemikiran teologi dalam masyarakat muslim yang sesungguhnya. Pola pemikiran seperti itu kemudian diikuti oleh kelompok muslim lainnya.

Ketika pemikiran Murji'ah sudah lebih bersifat sistematis dan teoritik, konsep tentang *irja'* tidak lagi berarti "penangguhan keputusan" di akhirat tentang status seseorang, tetapi lebih bermakna bahwa "penundaan" dalam perbuatan, yakni menganggapnya sebagai kepentingan yang sekunder, dengan mengutamakan keyakinan batin. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa konsep *iman* atau percaya semata-mata pada keyakinan batin, dan apa saja yang dilakukan orang pada hakekatnya tidak ada pengaruhnya terhadap status keimanannya.<sup>15</sup>

Dengan demikian Murji'ah mulai menampakkan kecenderungan kuat pada sikap *jabariah*, yakni suatu pemikiran yang memandang manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak

dan perbuatannya. Manusia hanya dipandang sebagai wayang, sedangkan “dalangnya” adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan kekuatan pada manusia untuk melakukan tindakan. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Dalam bahasa Inggris istilah ini disebut *fatalism* atau *predestination*.<sup>16</sup>

## Murji'ah dan Kekhalifahan Umayyah

Muawiyah dinobatkan sebagai khalifah di Iliya' (Yerusalem) pada 40 H/660 M. dengan penobatan ini, ibu kota provinsi Suri'ah, Damaskus, berubah menjadi ibu kota kekhalifan Islam yang baru. Meskipun telah resmi dinobatkan sebagai Khalifah setelah berhasil menyingkirkan Ali bin Thalib, Muawiyah memiliki kekuasaan yang terbatas karena banyak wilayah dunia Islam yang tidak mengakui kekhalifannya. Selama proses abitrasi berlangsung, Amr bin Ash, tangan kanan Muawiyah, telah merebut Mesir dari kelompok Syi'ah.<sup>17</sup> Meski demikian, para penduduk di wilayah Irak mengangkat al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai penerus yang sah. Sedangkan penduduk di kota Mekkah dan Madinah, yang selama dikenal sebagai pusat pemerintahan Islam, tidak memberikan legitimasi dan loyalitas yang utuh kepada penguasa baru Islam yang berasal dari keturunan Bani Umayyah ini. Hal ini karena mereka mengetahui bahwa Muawiyah mengakui kenabian Muhammad pada saat penaklukan Mekkah. Karena itu, banyak orang yang berasumsi bahwa pengakuan keislaman keluarga Bani Umayyah lebih merupakan upaya menyelamatkan kehormatan dari pada didasari oleh suatu keyakinan yang jujur.

Lemahnya legitimasi kekuasaan yang didapatkan oleh Muawiyah dari kaum muslim dapat tergambarkan dalam tulisan Hasan Ibrahim Hasan berikut ini:

“kemenangan Bani Umayyah yang dikomandoi oleh Muawiyah merupakan kemenangan ‘aristokrasi agama’ yang pernah disinyalir oleh Rasulullah dan sahabatnya sebagai ‘era feodalis’.... Kita tidak heran jika kaum muslimin membenci Bani Umayyah; mulai dari sikap, kesombongan, tipu daya dan tingkah laku mereka membangkitkan dendam lama dan menghidupkan ruh-ruh jahiliyah. Bahkan, mayoritas kaum muslim berpendapat bahwa para pejabat Bani Umayyah tidak mengimplementasikan Islam; mereka hanya mengejar kepentingan pribadi. Terlebih Muawiyah yang menjadikan kekhalifan sebagai hak milik, seperti Raja Kisra (Persia). Dan ini merupakan justifikasi dari ungapannya yang diriwayatkan al-Yaqubi, ‘Saya raja yang pertama’.<sup>18</sup>

Muawiyah dan para pengikut menyadari bahwa kekuasaannya tidak mendapatkan legitimasi yang kuat dari sebagian besar kaum muslimin. Karena itu selain ia harus menghadapi kekuatan militer dari kalangan Syi'ah dan Khawarij yang sering mengadakan pemberontakan bersenjata, tetapi juga mendapatkan serang delegitimasi secara politik dan moral yang diambil dari ajaran Islam yang dilakukan oleh musuh-musuh politiknya.

Pemikiran kaum Murji'ah yang selama ini menguntungkan posisi Kekhalifahan Umayyah, karena menganggap Muawiyah dan para pengikutnya masih seorang mu'min, meskipun telah melakukan dosa besar. Murji'ah menyetujui bahwa wilayah kekuasaan Muawiyah adalah *dar al-iman* (wilayah kaum mukmin) dan penduduknya ditetapkan sebagai kaum mukmin, karena itu tidak boleh diperangi oleh kaum muslimin lainnya.<sup>19</sup>

Melihat hal itu maka Muawiyah pun menjalin hubungan yang baik dengan para teolog Murji'ah. Hal ini yang mungkin yang menyeret pemikiran Murji'ah yang awalnya berusaha untuk bersifat netral dan moderasi secara politik dan keagamaan menjadi suatu kelompok theologis yang menganut sistem pemikiran yang *jabariyah* atau fatalisme. Dari keolompok yang netral menjadi pembela terhadap Bani Umayyah dari setiap penentangannya. Dengan demikian Dinasti Umayyah memiliki senjata intelektual yang bersumber dari ajaran agama untuk melakukan pembelaan atas politik yang mereka bangun yang selama ini dipandangan oleh lawannya sebagai tidak Islami, karena didirikan di atas fondasi kezaliman. Mereka berusaha untuk menjustifikasi kekuasaan yang diraihkannya dengan menggunakan dalil-dalil agama dengan menyatakan bahwa semua yang terjadi merupakan kehendak Allah: kehendak absolut yang tidak bisa dibatasi oleh kehendak manusia.

Pemikiran yang demikian itu memnag secara paradigmatic sangat kuat, kehendak seorang muslim yang sholeh pun tidak bisa membatasi kehendak Allah. Demikian pula halnya kehendak mereka tidak bisa mengimbangi kehendak Allah. Dengan demikian, Dinasti Umayyah berusaha menggiring wacana ini ke arah teologi fatalistik dan berusaha untuk melakukan cuci tangan dari konflik politik yang terjadi saat itu. "Allah telah menetapkan sejak azali dinasti ini (Bani Umayyah) berhasil memperoleh kekuasaan, dan kebijakannya tidak lain merupakn takdir yang digariskan Allah".<sup>20</sup>

Oleh karena itu, Khalifah Bani Umayyah melakukan tindakan keras terhadap para pemikir atau teolog (ulama) yang berpendapat tentang kebebasan manusia dan tanggung jawab manusia atas

perbuatannya. Khalifah Abdul Malik bin Marwan tidak melarang pembunuhan Ma'bad al-Juhani (w. 80 H), juga membiarkan Khalid bin Abdullah al-Qasri dalam kasus pembunuhan al-Jaid bin Dirhan (w.160) di mimbar setelah setelah shalat 'id. Keduanya berpendapat tentang kebebasan manusia dalam bertindak dan mengingkari takdir kebaikan dan kejelakan. Demikian juga pembunuhan atas Ghailan al-Dimasyqi (w.99) oleh Hisyam bin Abdul Malik dalam kasus yang sama.<sup>21</sup>

Ma'bad al-Juhani dan al-Jaid bin Dirham adalah para ulama yang selama ini memang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan bertindak. Mereka memang termasuk pada kelompok ulama *Qadariyah* (*freewill* dan *freeact*). Karena itu mereka tidak setuju terhadap pendapat para ulama *Murji'ah-Jabariyah* yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kekuatan untuk menentukan kehendak dan perbuatannya sendiri karena semuanya telah ditentukan oleh takdir Allah. Karena itu Dinasti Umayyah melihat kedua ulama tersebut sebagai ancaman terhadap ideologi dan kekuasaannya. Padahal Ja'id bin Dirham terkenal seorang yang sangat santun termasuk kepada Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah. Karena sebenarnya ia telah bersahabat lama semenjak Marwan menjadi gubernur di al-Jazirah sebelum menjadi khalifah.<sup>22</sup> Ini menunjukkan bahwa Ja'id pada awalnya memiliki akhlak yang santun, ketaatan yang baik dan hubungan yang baik dengan khalifah.

Para Khalifah Bani Umayyah memang berusaha untuk melepaskan tanggung jawab dengan mengeluarkan konsep fatalisme (*al-jabariyyah*), kemudian menyandarkan setiap fenomena kezaliman dan kejelakan pada kehendak Tuhan. Tujuan sebenarnya adalah untuk mencari justifikasi dari setiap kebijakan yang dikeluarkannya dan mencari dari setiap realitas yang terjadi akibat perbuatannya. Seperti ketika Abdul Malik bin Marwan membunuh Amr bin Sa'id. Ia malah menyuruh melempar kepalanya ke kerumunan para pengikutnya yang setia yang menunggu kepulangannya di depan Istana. Bahkan dengan lantang, sebagaimana perkataan yang pernah diucapkan Muawiyah, Abdul Malik berseru, "Amir al-Mu'minin telah membunuh sahabat kalian, karena hal ini telah ditetapkan dan perintah telah diputuskan oleh Allah semenjak zaman azali".<sup>23</sup>

Dengan demikian, setiap kedzaliman Bani Umayyah selalu disandarkan, dengan konsep fatalistik atau *jabariyah*, pada kehendak Tuhan. Para ulama yang selama ini menanut pemikiran kebebasan berbuat (*ikhtiyar*) menolak klaim para Khalifah Bani Umayyah tersebut yang menyatakan bahwa kedzaliman, pembunuhan, dan kejahatan adalah

kehendak Allah. Penolakan itu kemudian berkembang menjadi dikotomi antara sifat manusia dan sifat ketuhanan, dan penolakan penyerupaan Allah bagi manusia, baik secara esensi (dzatīyyah) maupun perbuatan (*fi'liyyah*), selama manusia melakukan aktivitas kemanusiaannya.

Kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para Khalifah Bani Umayyah sebenarnya tidak disetujui oleh semua ulama penganut madzhab teologi Murji'ah. Tetapi karena para Khalifah Bani Umayyah sering berlindung pada argumen yang dikemukakan oleh para theolog Murji'ah, maka para ulama dalam madzhab ini pun akhirnya pecah menjadi beberapa kelompok. Perpecahan itu digambarkan oleh al-Baghdadi sebagai berikut:

Murji'ah terpecah dalam tiga golongan *Pertama*, berpendapat bahwa *ijma'* hanya berlaku dalam masalah keimanan, sedangkan dalam masalah perbuatan mengikuti pendapat Qadariyyah-Mu'tazillah. Yang termasuk pada kelompok ini adalah Ghailan al-Dimasyqi, Abu Syamr, dan Muhammada bin Syabib al-Bashri. *Kedua*, berpendapat bahwa *ijma'* berlaku dalam masalah keimanan dan bersikap *jabariyyah* dalam perbuatan, sesuai dengan pendapat Jahm bin Shafwan. Dengan demikian mereka itu kemudian dikenal dengan golongan Jahmiyyah. *Ketiga*, menyakini bahwa *ijma'* berlaku pada semua tindakan dan keimanan. Golongan ini sama sekali tidak mengikuti pendapat Jabariyyah dan Qadariyyah tentang apa pun.<sup>24</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Harun Nasution membagi kaum Murji'ah ke dalam dua kelompok besar, yakni: golongan moderat dan golongan ekstrim. Kelompok moderat adalah Al-Hasan bin Muhamad Bin Ali Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan beberapa ahli Hadits. Sedangkan kelompok yang ekstrim adalah al-Jahmiyah, yaitu; pengikut Jhambin Safwan.<sup>25</sup>

Kelompok Murji'ah ini yang dipandang sebagai peletak ideologi bagi Dinasti Bani Umayyah memang tidak berkembang lagi ketika sistem politik yang menopangnya, yakni Bani Umayyah sendiri, hancur oleh kekuatan baru yakni muncul Dinasti Abbasiyyah yang pada awal kemunculannya banyak didukung oleh kelompok-kelompok yang selama ini menentang Kekhalifan Bani Umayyah. Meskipun demikian pemikiran theolog Murji'ah yang sangat canggih itu mempengaruhi kelompok atau aliran theolog Islam yang lainnya.

## Penutup

Ajaran Murji'ah yang pada awalnya memang bersikap inklusif, merangkul semua kelompok muslim agar tidak saling menyalahkan dan

mengakhiri konflik, tetapi kemudian menjadi landasan bersikap *jabariyyah* yang kemudian dieksploitasi untuk kepentingan politik Bani Umayyah. Ajaran seperti ini memang rawan untuk diselewengkan karena dapat membawa kepada *moral hazard* (kekacauan moral), karena akan menimbulkan sikap yang dapat mentolerir penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma moral dan hukum yang seharusnya ditegakkan. Karena yang dipentingkan hanyalah iman, norma-norma moral atau hukum bisa dipandang kurang penting dan diabaikan oleh orang-orang yang menganut paham demikian.

Inilah yang kemudian yang dipersepsi oleh sebagian para ulama Islam sebagai Madzhab yang tidak baik dan tidak disenangi. Selain memang karena faktor-faktor politik yang berubah. Ajaran Murji'ah yang mendukung kekuasaan Dinasti Bani Umayyah, dicitrakan negatif oleh para ulama yang mendukung Kekhalifan Abbasiyah. Padahal pada dinasti inilah perkembangan intelektual Islam tumbuh dan berkembang dengan pesat, termasuk dalam formulasi theologis.

Meskipun tanpa disadari oleh sebagian umat Islam yang datang kemudian bahwa ajaran golongan Murji'ah, terutama yang moderat, sesungguhnya banyak mempengaruhi kelompok Ahli Sunnah wal Jammah yang secara theologis menganut paham Al-Asy'ari. Hal ini jelas terlihat dari pendapat Al-Asy'ari sendiri yang menyatakan bahwa *iman* adalah pengakuan dalam hati tentang keesaan Allah, kebenaran Rasul-rasul dan segala apa yang mereka bawa. Iman adalah mengucapkan dengan lisan sedangkan mengerjakan rukun-rukun Islam merupakan cabang dari iman. Orang yang berbuat dosa besar, jika meninggal dunia tanpa taubat, nasibnya terletak di tangan Tuhan. Ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya itu, tetapi ada pula kemungkinan tidak akan diampuni dan akan menyiksanya sesuai dengan dosa-dosa yang dibuatnya dan kemudian dia baru masuk sorga.<sup>26</sup>

Pendapat Al-Asyari tersebut jelas identik dengan salah satu pendapat dalam kelompok Murji'ah yang bersifat moderat. Nampaknya memang Al-Asyari juga berusaha untuk mengambil jalan tengah dan moderasi terhadap kekuasaan Dinasti Abbasiyyah yang sebenarnya tidak lebih baik dari Dinasti Bani Umayyah dalam memperlakukan lawan politik dan orang-orang yang menentang kekuasaannya. Oleh karena itu Madzhab al-Asyari'ah pun akhir menjadi madzhab resmi Dinasti Abbasiyah, kecuali pada Khalifah Al-Makmun dan al-Mutawakkil yang menganut madzhab Mu'tazilah. Kekuasaan politik memang senang mencari mitra yang sesuai dengan kepentingannya, termasuk dalam

memilih madzhab pemikiran dalam agama, tidak terkecuali dalam sejarah politik Islam.

*Allah 'alam bi al-shawab.*

#### Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Para pemikir muslim berbeda pendapat mengenai paradigma hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Namun setidaknya ada tiga paradigma yang berkembang dalam pemikiran politik Islam saat ini. *Pertama*, bersatunya agama dan negara. Dalam hal ini Islam dan negara tidak bisa dipisahkan (*integrated*). Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar “kedaulatan Tuhan”. Paradigma ini dianut oleh kelompok Syiah dan kaum fundamentalis. Kedua, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena negara mendapat bimbingan etika dan moral dari agama. Pandangan seperti ini dapat ditemukan dalam pemikiran al-Mawardi, al-Ghazali sebagai pemikiran pembaharu Islam. *Ketiga*, agama dan negara terpisah atau bersifat sekuleristik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun simbiotik antara agama dan negara. Paradigma sekuleristik menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari pada negara. Salah seorang pemrakarsanya adalah Ali bin Abd Razik. Mengenai hubungan antara agama dan negara lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1990. Lihat pula tulisan M. Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam”, *Ulumul Qur'an*, Vol. IV. No. 2 tahun 1993, p. 4-9.

<sup>2</sup> Albert Hourani, *Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim*, Mizan, Bandung, 2004, p. 79.

<sup>3</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, UI Press, Jakarta, 1986, p. 11.

<sup>4</sup> Lihat kumpulan tulisan yang membahas tentang hubungan ideologi dan kekuasaan Yudi Latif dan Idi Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan*, Mizan, Bandung, p. 1996.

<sup>5</sup> Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, vol. III, Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, Kairo, 1964, p. 5

<sup>6</sup> Azyumardi Azra, “Islam dan Negara: Eksperimen dalam Masa Modern, Tinjauan Sosio Historis,” *Ulumul Qur'an*, vol. IV No. 2 Tahun 1993, p. 10-11

<sup>7</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam*, p. 7

<sup>8</sup> Toshihiko Izutsu, *The Concept of Belief in Islamic Theology: A Semantical Analysis of Iman and Islam*, Yuridho Publishing Company, Tokyo, 1966, p. 46.

<sup>9</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, The Chicago University Press, Chicago, 1979, p. 243

<sup>10</sup> Kelompok Syi'ah yang sering mengadakan pemberontakan terhadap pihak-pihak yang dianggap telah menyeleweng adalah Assainsn dan Karmatians. Untuk pembahasan keduanya lihat H.A.R. Gibb and J.H. Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, E.J. Brill, Leiden, 48-49, 218-222.

<sup>11</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam*, p. 22

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 23.

<sup>13</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, p. 118

- <sup>14</sup>Toshihiko Izutsu, *The Concept of Belief in Islamic Theology: A Semantical Analysis of Iman and Islam*, Yuridho Publishing Company, Tokyo, 1966, p. 50.
- <sup>15</sup>Ibid, 51
- <sup>16</sup>Harun Nasution, *Teologi Islam*, p. 31.
- <sup>17</sup>Philip K. Hitti, *History of The Arabs: Froms the Earliest Times to the Present*, Palgrave Macmillan, 1970, p. 236.
- <sup>18</sup>Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam al-Siyasi*, jilid I, Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, Kairo, 1964, p. 278.
- <sup>19</sup>Abu Musa al-Ashari, *Maqalat al-Islmiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin*, edisi Muhammad Muhy al-din Abd Hamid, Maktabah al-Nahdhah, Mesir, 1970, p. 225.
- <sup>20</sup>Ignaz Goldziher, *Introduction to Islmic Theology and Law*, Princeton University Press, Princeton, 1981, p. 86
- <sup>21</sup>Lihat al-Syahrastani, (Abu al-Fath Muhammad Abdul Karim), *Al-Milal wa al-Nihal*, jilid I, edisi Muhamad Sayyid al-Kailani, Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1967, p. 30. Lihat juga Al-Baghdadi (Abu Manshur Abdul Qahir bin Thahir al-Tamimi), *Al-Firaq bainan al-Firaq*, edisi Muhammad Muhiddin 'Abdul Hamid, Maktabah Ali Shabih, t.t. p. 18-19.
- <sup>22</sup>Lihat Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam al-Siyasi*, p. 319, dan Al-Asy'ari, *Maqalat al-Islmiyyin*, p. 10-11.
- <sup>23</sup>Nasr Hamid Abu Zaid, *Menalar Firman Tuhan: Wacana Majas dalam al-Qur'an Menururt Mu'tazilah*, Mizan, Bandung, 2003, p. 36
- <sup>24</sup>Al-Baghdadi, *Al-Firaq bainan al-Firaq*, p. 202.
- <sup>25</sup>Harun Nasution, *Teologi Islam*, p. 24-25
- <sup>26</sup>Al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, p. 101

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Musa al-Ashari, *Maqalat al-Islmiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin*, edisi Muhammad Muhy al-din Abd Hamid, Maktabah al-Nahdhah, Mesir, 1970.
- Ahmad Amin, *Duba al-Islam*, vol.III, Kairo, 1963.
- Albert Hourani, *Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim*, Mizan, Bandung, 2004.
- Azyumardi Azra, "Islam dan Negara: Eksperimen dalam Masa Modern, Tinjauan Sosio Historis," *Ulumul Qur'an*, vol. IV No. 2 Tahun 1993
- Al-Baghdadi (Abu Manshur Abdul Qahir bin Thahir al-Tamimi), *Al-Firaq bainan al-Firaq*, edisi Muhammad Muhiddin 'Abdul Hamid, Maktabah Ali Shabih, t.t.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam al-Siyasi*, jilid I, Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, Kairo, 1964.

- Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Ignaz Goldziher, *Introduction to Islamic Theology and Law*, Princeton University Press, Princeton, 1981
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1990.
- M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Qur'an*, Vol. IV. No. 2 tahun 1993.
- Nasr Hamid Abu Zaid, *Menalar Firman Tuhan: Wacana Majas dalam al-Qur'an Menurut Mu'tazilah*, Mizan, Bandung, 2003.
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs: Froms the Earliest Times to the Present*, Palgrave Macmillan, 1970
- al-Syahrastani, (Abu al-Fath Muhammad Abdul Karim), *Al-Milal wa al-Nihal*, jilid I, edisi Muhamad Sayyid al-Kailani, Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1967
- Toshihiko Izutsu, *The Concept of Belief in Islamic Theology: A Semantical Analysis of Iman and Islam*, Yuridho Publishing Company, Tokyo, 1966.
- Yudi Latif dan Idi Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan*, Mizan, Bandung, p. 1996.

---

**M. Hudaeri**, adalah Dosen jurusan Ushuluddin STAIN "SMHB"  
Serang, Banten